

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan zaman dan pembentukan arah pembangunan Nasional yang salah satunya terfokus terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar, pedoman dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini berlaku pada seluruh aspek yang akan bertujuan dalam pembangunan nasional yang tidak bersifat berfokus pada satu tempat dan satu daerah saja akan tetapi kesejahteraan yang merata dan adil dari Sabang sampai Merauke, hal ini berlaku pada seluruh aspek yaitu: ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Salah satu aspek yang di lihat dari pembangunan nasional yaitu perkembangan ekonomi suatu negara yang diukur dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang dapat digambarkan secara nasional melalui Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB). Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Rupiah Milyar)**

Tahun	PDB (Rupiah Milyar)
2013	8 .156.497,80
2014	8 .564.866,60
2015	8 .982.517,10
2016	9 .434.632,30
2017	9 .912.703,60
2018	10 .425.316,30

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai terbitan)

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang perkembangan PDB di Indonesia dari tahun 2013-2018 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun - ketahun. Pada tahun 2013 sebesar Rp 8.156.497,80 disebabkan karena dampak krisis global antara China dan Amerika Serikat pulih, pada tahun 2014 sebesar Rp 8.564.866,60 disebabkan pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi serta dicapainya komponen pengeluaran komponen konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRRT), tahun 2015 sebesar Rp 8.982.517,10 disebabkan belanja infrastruktur yang cukup besar serta realisasi penerimaan pajak yang baik dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 sebesar Rp 9.434.632,30 diakibatkan kenaikan di jasa keuangan dan asuransi, informasi, komunikasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 sebesar Rp 9.912.703,60 dikarenakan jasa-jasa pada tahun sebelumnya yang naik dan komponen ekspor barang yang naik, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 10.425.316,30 disebabkan oleh kenaikan pada jasa-jasa pada tahun sebelumnya dan kenaikan pada sektor yang lainnya yaitu usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Tetapi ada hal yang menarik pada tahun 2017 terjadi peningkatan PDB yang cukup besar yang disebabkan oleh volume ekspor-impor indonesia meningkat ditambah dengan menguatnya harga-harga komoditas di paruh pertama yang menyumbang tingginya surplus anggaran. Di sisi

lain harga minyak dunia jauh lebih rendah dari realita pasar yang berpotensi mempengaruhi kebijakan fiskal ke dalam perekonomian dengan asumsi *tax ratio* tetap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi PDB yaitu: tanah dan kekayaan alam, mutu tenaga kerja dan penduduk, barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat.

Variabel lainnya yang mempengaruhi Jumlah PDB di Indonesia adalah Investasi Swasta. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 :

**Tabel 1.2 Investasi Swasta Di Indonesia Tahun 2013-2018**

Tahun	Investasi Swasta		
	(Rp Milyar)		
	PMDN	PMA	Total
2013	128.150.000	348.812.613	476.962.613
2014	156.126.000	354.900.760	511.026.760
2015	179.465.000	403.848.625	583.313.625
2016	216.230.000	389.160.304	605.390.304
2017	262.351.000	436.773.972	699.124.972
2018	194.723.000	305.580.203	500.303.203

**Sumber**  
: Badan  
Pusat  
Statistik  
(diolah  
dari

berbagai terbitan)

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Tingkat Investasi Swasta di Indonesia mengalami fluktuasi. Nilai jumlah Investasi Swasta di Indonesia pada Tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 128.150.000 milyar dan di tahun 2016 menjadi Rp 605.390.304 milyar ini disebabkan karena total investasi swasta yang meningkat dikarenakan daya beli domestik masyarakat dan meningkatnya kepercayaan investor yang menanam modal di indonesia, tingkat Investasi Swasta yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp

699.124.972 peningkatan investasi yang sangat tinggi dikarenakan perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-perubahan 2017 serta kelayakan Indonesia yang layak menjadi tempat investor yang dilakukan oleh suatu lembaga internasional. Dan pada tahun 2018 terjadi penurunan tingkat investasi yang begitu besar sebesar Rp 500.303.203. Dilihat dari penyebabnya penurunan investasi di Indonesia pada tahun 2018 dikarenakan Indonesia sedang menjalani tahun politik mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah sehingga para investor masih melihat bagaimana kondisi politik di Indonesia. Ditambah lagi perang dagang antara AS dengan China yang membuat investor masih berpikir untuk melakukan investasi. Perang dagang yang terjadi antara kedua negara yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar akan berdampak terhadap perekonomian di negara lain, terutama di negara berkembang seperti negara Indonesia.

Peranan investasi dalam pembangunan ekonomi semakin besar dan sangat diperlukan dalam memperdayakan berbagai sumber daya alam dan manusia. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah yang salah satunya yaitu investasi swasta yang bertujuan untuk memajukan roda pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Menurut Leo Putra Rinaldy tentang hubungan belanja pemerintah dengan investasi swasta :

**“Penyerapan belanja modal pemerintah sangat penting untuk mengundang realisasi investasi swasta yang dibutuhkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Porsi penyerapan belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi tidak sebesar investasi swasta, tetapi ‘capital spending’ namun ternyata ‘esensial’. Realisasi belanja**

modal pemerintah sangat penting dalam mewujudkan infrastruktur, seperti jalan raya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja investasi swasta.”<sup>1</sup>

**Tabel 1.3 Belanja Pemerintah Di Indonesia Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pemerintah (Rupiah Milyar)</b>
2013	1.137.162,90
2014	1.203.577,20
2015	1.183.303,70
2016	1.154.018,20
2017	1.265.359,40
2018	1.453.630,20

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai terbitan)

Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Belanja Pemerintah di Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp 1.137.162,90 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.203.577,20 dikarenakan naiknya penerimaan pajak dan penerimaan penerimaan negara bukan pajak yang tinggi dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 sebesar Rp 1.183.303,70 disebabkan peningkatan pendapatan dan penurunan belanja pemerintah disamping adanya penyesuaian PDB nominal , pada tahun 2016 penurunan sebesar Rp 1.154.018,20 penyebabnya dikarenakan perlambatan ekonomi global dan terganggunya konsumsi rumah tangga akibat dari melemahnya daya beli. Pada tahun 2017 sebesar Rp 1.265.359,40 disebabkan pertumbuhan ekspor dan investasi yang membaik , pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.453.630,20 belanja pemerintah meningkat cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran ini atas perintah Presiden Jokowi untuk

---

<sup>1</sup>Leo Putra Rinaldy, **Penyerapan Belanja Pemerintah Kunci Pemerintah investasi swasta**, <https://amp.suara.com/bisnis/2016/08/01/034237/penyerapan-belanja-pemerintah-kunci-investasi-swasta2016> (diakses tanggal 10 November 2019)

program perlindungan sosial, peningkatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastuktur, reformasi birokrasi, dan penguatan disentralisasi fiskal.

Dengan pesatnya aliran modal yang berasal dari belanja pemerintah, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin fluktuasi. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak positif atau negatif untuk Pembangunan Ekonomi.

Menurut Todaro:

**“Pertumbuhan penduduk dan Pertumbuhan Angkatan Kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.”<sup>2</sup>**

Menurut data dari BPS mengenai Data Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2013-2018 mengalami tren kenaikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4 Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Tenaga Kerja (Orang)</b>
2013	112.761.072
2014	114.628.026

---

<sup>2</sup>Michael P.Todaro & Stephen C. Smith , **Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga**, Edisi Kedelapan, Jakarta, Airlangga 2006, hal. 93.

2015	114.819.199
2016	118.411.973
2017	121.022.423
2018	124.001.247

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai terbitan)

Dari Tabel 1.4 dapat menjelaskan bahwa angka tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 112.761.072 orang disebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi, tahun 2014 sebanyak 114.628.026 orang disebabkan karena penurunan pengangguran yang berkurang pada tahun ini, Pada tahun 2015 sebanyak 114.819.199 orang disebabkan penyerapan kenaikan di sektor konstruksi, tahun 2016 sebanyak 118.411.973 orang disebabkan penyerapan di sektor konstruksi turun namun mengalami kenaikan jumlah di sektor jasa masyarakat, pada tahun 2017 sebanyak 121.022.423 orang dikarenakan kenaikan TPAK yang memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi di Indonesia, dan pada tahun 2018 sebanyak 124.001.247 orang, yang berarti setiap tahun jumlah tenaga kerja semakin bertambah, penambahan jumlah tenaga kerja sesuai juga dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya.

Variabel lainnya yang mempengaruhi Jumlah PDB di Indonesia adalah inflasi. Menurut data dari BPS mengenai data Inflasi di Indonesia tahun 2013-2018 mengalami tren penurunan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5 Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi</b>
	<b>(%)</b>
2013	8,38
2014	8,36
2015	3,35
2016	3,02

2017	3,61
2018	3,13

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (diolah dari berbagai terbitan)

Dari Tabel 1.5 dapat menjelaskan bahwa tingkat Inflasi di Indonesia Pada Tahun 2013 sebesar 8,38 % penyebabnya dikarenakan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pada tahun 2014 sebesar 8,36 % disebabkan karena efek kenaikan BBM yang bulan sebelumnya dan tarif angkutan udara, cabai, beras dan lauk pauk, pada tahun 2015 sebesar 3.35 % disebabkan karena kenaikan gas elpiji dan kenaikan BBM dan musim panen yang sulit diprediksi, pada tahun 2016 penurunan sebesar 3,02 % dikarenakan daya beli yang merosot yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia, Pada tahun 2017 kenaikan sebesar Rp 3,61 % diakibatkan kebijakan pemerintah yang mengatur barang dan jasa yang berupa bahan bakar, minyak dan tarif dasar listrik, dan Pada tahun 2018 penurunan sebesar 3,13% disebabkan karena pemerintah menjaga harga-harga tetap stabil baik berupa harga bahan pokok maupun tarif dasar listrik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang PDB di Indonesia dan mengajukan judul “**Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Inflasi, terhadap PDB di Indonesia Tahun 2003-2018**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini antara lain mempertanyakan:

1. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Investasi Swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018 ?



2. Bagaimanakah pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018 ?
4. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018 ?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Tingkat Investasi Swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018.
4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2003-2018

### **1.4 Manfaat**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
2. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau kajian pustaka terkait dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia 2003-2018.

3. Sebagai bahan studi tambahan dan karya ilmiah bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, khususnya bagi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Domestik Bruto (PDB)**

##### **2.1.1. Pengertian Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu komponen dalam pendapatan nasional selain Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto (PNN), Pendapatan Nasional (NI), Pendapatan Personal (PI), dan Pendapatan Personal Disposabel.

Menurut Kunawangsih dan Antyo sebagaimana dikutip oleh Mubarak menjelaskan bahwa

**“Produk Domestik bruto (PDB) adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan maupun warga negara asing yang bekerja di wilayah tersebut, jumlah PDB dalam suatu negara menggambarkan kemampuan atau pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut”<sup>3</sup>**

---

<sup>3</sup>Mu'min Mubarak, **Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia**, Skripsi:Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Gorontalo, 2014 ,hal. 5 (skripsi diterbitkan)

Untuk menggambarkan perubahan-perubahan ekonomi maka diperlukan penyajian angka PDB yang dapat menggambarkan kejadian tersebut. Penyajian angka PDB sendiri, biasanya dibedakan menjadi dua yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan. PDB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*).

Faktor-faktor penyebab PDB mengalami kenaikan disebabkan oleh: 1) meningkatnya komponen produksi, 2) komponen pengeluaran, 3) tanah dan kekayaan alam, 4) mutu tenaga kerja dan penduduk, 5) barang modal dan tingkat teknologi, 6) sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan faktor-faktor penyebab PDB menurun disebabkan oleh : 1) ekspor yang tidak meningkat, 2) terlalu bergantungnya indonesia kepada bahan baku dan barang modal, 3) industri mengalami stunning, 4) optimisme bisnis dan konsumen yang lesu, 5) iklim investasi yang belum baik dan signifikan, 6) penyerapan anggaran pemerintah yang perlu diperbaiki, 7) dana transfer ke desa yang tidak baik.

Pengertian Produk Domestik Bruto yang lain adalah PDB atas dasar berlaku , PDB atas dasar konstan, dan PDB perkapita yaitu:

- a. PDB atas dasar berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- b. PDB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang nilai atas harga tetap suatu tahun tertentu.
- c. PDB perkapita yaitu PDB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

### **2.1.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Renata: “teori-teori pertumbuhan ekonomi melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi Perbedaan teori dengan satu yang lainnya terletak pada fokus dan pembahasan yang digunakan.

**a. Teori Pertumbuhan Klasik**

Teori pertumbuhan Klasik dipelopori oleh beberapa tokoh, yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Jhon Stuart Mill Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: Jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik *The Law of Dimishing Returns* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan dapat mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkenang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Berdasarkan teori pertumbuhan Klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan Teori Optimus.

**b. Teori Neon-Klasik**

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandangan penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan dan kepakaran tenaga kerja”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Renata, Analisis Kausalitas Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2007, Hal.9 (Skripsi tidak publikasikan)

## **2.2 Investasi Swasta**

### **2.2.1. Pengertian Investasi Swasta**

Langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal pembangunan ekonomi, investasi yang berasal dari Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan investasi dengan profit atau investasi swasta.

### **2.2.2. Teori – Teori Investasi**

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara yang menaikkan stok capital yang membuat produktivitas akan naik juga. Teori nya terdiri dari :

- a. **Teori Neo Klasik yang menjelaskan bahwa penekanan sangat penting pada tabungan dikarenakan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, makin cepat perkembangan volume stok capital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produktivitas per tenaga kerja.<sup>5</sup>**
- b. **Teori Harrod-Domar dikembangkan secara terpisah (sendiri-sendiri) dalam periode yang bersamaan oleh E. S. Domar (1947, 1948) dan R. F. Harrod (1939,1948). Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatkan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.<sup>6</sup>**

### **2.2.3. Bentuk-Bentuk Investasi**

---

<sup>5</sup>Jamaliah, Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi di Kota Pontianak Kajian Model Granger, **Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan** , Universitas Tanjungpura ,Vol. 7, No 1, 2018, hal 24.

<sup>6</sup>Renata, **Ibid**, hal. 12-14

- a. Investasi pada aktiva riil adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya: investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain.
- b. Investasi pada aktiva finansial adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga. Misalnya: saham, deposito, dan lain-lainnya.

#### **2.2.4. Jenis-Jenis Investasi**

- a. Tabungan : dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperoleh kita mengambil uang kapan pun yang inginkan.
- b. Deposito : Produk yang hampir sama dengan tabungan, yang mempunyai perbedaan yaitu deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan yang dimana investor menerima keuntungan dari bunga yang ada di deposito.
- c. Saham : adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut, dengan membeli saham dari perusahaan tersebut.
- d. Properti : jenis Investasi yang termasuk investasi non riil karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung atau apartemen.
- e. Obligasi : umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal.
- f. Reksadana : tempat menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer.
- g. Emas : investasi yang berupa dalam emas batangan hampir sama dengan investasi properti.

### **2.3 Belanja Pemerintah**

#### **2.3.1. Defenisi Belanja Pemerintah**

**“Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net-ekspor (ekspor dikurangi impor). Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan belanja pemerintah”.**<sup>7</sup>

Belanja pemerintah adalah salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Menurut Sayekti Suindyah D yang mengutip penjelasan dari Lincoln menjelaskan tentang Belanja pemerintah:

**“Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah”.**<sup>8</sup>

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Dan tujuan yang

---

<sup>7</sup>Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, **Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia**, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20141231133039478508722> , 2016. (diakses tanggal 26 Februari 2020)

<sup>8</sup>Sayekti Suindyah D, **Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur**, <https://ejournal.stiesia.ac.id/index/search/authors/view?firstName=Sayekti&middleName=&lastName=Suindyah%20D&affiliation=Fakultas%20Ekonomi%20Universitas%20%20Darul%20E2%80%99Ulum%20Jombang&country=ID> , 2009, (Diakses tanggal 10 januari 2020), Hal 483-484.

lainnya juga seperti menstabilkan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan harga. dan pemerintah juga berusaha mengoptimalkan peran tersebut melalui Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Secara riil belanja pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian ditunjukkan dalam pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam bentuk persentase dari total pengeluaran yang cenderung meningkat.

### 2.3.2. Teori Belanja Pemerintah

Intervensi

pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan belanja pemerintah. Ada beberapa teori tentang Belanja Pemerintah yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi :

a. Teori Rostow dan Musgrave :

**“Menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tahap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.”<sup>9</sup>**

b. Teori Peacock dan Wiseman:

---

<sup>9</sup>Darma Rika Swaramarinda, dan Susi Indriani, Jurnal Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia: **Jurnal Ekono Sains** Vol IX, Nomor 2 , Agustus 2011, hal. 100



**“Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar”<sup>10</sup>**

c. Teori Batas Kritis Colin Clark :

“Menyatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah dengan kata lain sektor pemerintah diperkirakan  $\pm 25\%$  GNP. Meskipun anggaran pemerintah seimbang, jika batas  $\pm 25\%$  GNP terlewati maka akan terjadi inflasi dan kekacauan ekonomi.”<sup>11</sup>

### **2.3.3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Belanja Pemerintah**

Besarnya belanja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Pemerintah dipengaruhi banyak faktor - faktor yaitu:

- a) **“Proyeksi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, salah satu faktor yang menentukan besarnya belanja pemerintah adalah jumlah pajak yang diproyeksikan.**
- b) **Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, yaitu besarnya anggaran pemerintah yang dipengaruhi oleh tujuan yang dicapai oleh pemerintah. belanja**

---

<sup>10</sup>Singgih Samsuri, **Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatera**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, 2016. hal 28-29. (Skripsi dipublikasikan)

<sup>11</sup>Irhamni, **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1986-2015**, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. hal 31. (Skripsi dipublikasikan)

pemerintah dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan oleh pemerintah.

- c) **Pertimbangan politik dan keamanan, pemerintah mengeluarkan pembiayaan untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan lainnya, yang bertujuan agar perekonomian bisa berjalan dengan tujuan pembangunan.**<sup>12</sup>

## **2.4. Tenaga Kerja**

### **2.4.1. Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah kelompok pekerja dalam suatu pekerjaan, hal ini umumnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau industri, jasa yang terletak pada geografis seperti kota di negara bagian dan lainnya.

Menurut Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing, Dame Esther Hutabarat, menjelaskan arti dari tenaga kerja , “Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya yang tergolong usia kerja adalah usia 15-64 tahun. Dalam tenaga kerja sudah termasuk angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*not in the labor force*).”<sup>13</sup>

Menurut UU No 13 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2, menjelaskan tentang ketenagakerjaan disebut bahwa, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>14</sup>

### **2.4.2. Teori Angkatan Kerja**

- a. Teori Klasik Adam Smith

---

<sup>12</sup>Karolina Arintonang, **Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2000-2018**, Skripsi Fakultas Ekonomi ,Universitas HKBP Nommensen:, 2019,hal 24 - 25.

<sup>13</sup>Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester M. Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal. 57

<sup>14</sup>Undang-Undang Dasar No 13 Tahun 2013 **Tentang Ketenagakerjaan**.

Teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

#### b. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Dalam teori nya disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

#### c. Teori Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebentar saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar yaitu: setiap perusahaan yang menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula. Di mana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi.

### **2.4.3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja**

- a.** Menurut Kemampuannya: Berdasarkan skill atau kemampuan, yang pertama adalah tenaga kerja terdidik dengan riwayat menempuh pendidikan tinggi seperti lulusan sarjana. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keterampilan. Tenaga kerja jenis ini tidak selalu mengenyam pendidikan tinggi, tapi menguasai skill tertentu dan juga cepat dalam belajar. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja jenis ini terdiri dari orang-orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan dan juga tidak punya kemampuan khusus.
- b.** Menurut Sifatnya: Apabila dilihat berdasarkan sifatnya, maka tenaga kerja dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah [tenaga kerja rohani](#), yang bekerja dengan menggunakan otaknya, Yang kedua adalah [tenaga kerja jasmani](#), Yaitu tipe orang yang bekerja dengan menggunakan tenaganya.
- c.** Menurut Hubungan dengan Produk: [Tenaga kerja](#) menurut hubungan dengan produk ini dibagi atas dua golongan, Yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Dimana pekerja

langsung terjun dalam proses pembuatan produk. Yang Kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, dimana pekerja tidak langsung ikut dalam proses pembuatan produk.

- d. Menurut Jenis Pekerjaannya: Dilihat dari jenis pekerjaannya maka tenaga kerja dibagi menjadi tiga golongan. Pertama adalah tenaga kerja lapangan kedua adalah tenaga kerja pabrik seperti buruh produksi, dan yang ketiga adalah tenaga kerja kantor atau [perusahaan](#).

## **2.5. Inflasi**

### **2.5.1. Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah dimana saat suatu keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa yang pada umumnya akan membuat harga terus-menerus akan naik dalam jangka waktu tertentu.

Indikator untuk mengukur kenaikan tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu dalam tingkat inflasi dalam perekonomian dalam waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

### **2.5.2. Teori Inflasi**

#### **a. Teori Keynes**

Pembahasan tentang inflasi dalam teori Keynes didasarkan pada teori makronya. Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat cenderung ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini menimbulkan *inflationary gap*. Ketika *inflationary gap* tetap ada, maka selama itu pula proses inflasi terjadi dan berkelanjutan.

## b. Teori Strukturalis

Merupakan teori yang menjelaskan fenomena inflasi dalam jangka panjang. Hal ini didasarkan pada penjaslannya yang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara.

### 2.5.3. Jenis-jenis Inflasi

1. Inflasi dilihat dari tingkat keparahan.

- a. Inflasi ringan, kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun
- b. Inflasi sedang, kenaikan harga hingga 30% per tahun
- c. Inflasi tinggi, kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30%-100%
- d. Hiperinflasi, kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak signifikan.

2. Inflasi berdasarkan asalnya, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a. Inflasi yang berasal dari domestik (*domestic inflation*)

Penyebabnya meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, kenaikan harga barang atau jasa, permintaan masyarakat tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak lainnya.

- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Penyebabnya harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena kenaikan harga di negara asalnya.

## **2.6. Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen**

### **2.6.1. Hubungan Jumlah Investasi Swasta dengan PDB**

Jumlah Investasi Swasta akan sangat mempengaruhi dikarenakan Investasi Swasta adalah gabungan dari Penanaman Modal Asing (PMA) & Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), secara umum Investasi memiliki hubungan jangka panjang dengan PDB, investasi cenderung mengikuti pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam pengambilan kebijakan dalam investasi sering kali melihat laju pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Menurut Setyowati dan Faatimah dalam Ahmad Saipul Qahfi dalam teorinya menyatakan bahwa:

**“Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan produktivitas tenaga kerja”<sup>15</sup>**

Selanjutnya hubungan Investasi Swasta ini juga dijelaskan oleh Rini Sulistiawi yang mengutip dari penjelasan Todaro menjelaskan tentang investasi yaitu :

**“Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.”<sup>16</sup>**

Investasi sangat erat kaitanya dengan aktivitas penarikan sumber-sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. dengan harapan semua barang dan jasa itu menghasilkan produk baru di masa depan. Dari teori Neo Klasik tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>15</sup>Ahmad Saipul Qahfi, **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2015**, Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, 2018,hal 7 (Skripsi di Publikasi )

<sup>16</sup>Rini Sulistiawi, Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia: **Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan**, Vol. 3, No. 1, 2012, Hal 36-37.

bahwa investasi swasta berhubungan positif terhadap PDB dimana saat investasi meningkat akan mendorong meningkatkan PDB.

### **2.6.2. Hubungan Belanja Pemerintah dengan PDB**

Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan tergantung dari besarnya penerimaan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan Pengeluaran pemerintah.

Menurut Darma Rika Swamarinda dan Susi Indriani yang mengutip Teori Rostow dan Musgrave mengatakan bahwa:

**“Teori yang menjelaskan hubungan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investsi total dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tahap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.”<sup>17</sup>**

Selanjutnya hubungan antara Belanja Pemerintah dengan PDB dijelaskan oleh Sadono Sukirno yang berpendapat bahwa :

**Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, pajak yang diterima pemerintah, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. Pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.**

---

<sup>17</sup>Darma Rika Swamarinda, dan Susi Indriani, **Op.Cit**, hal. 100



**Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.<sup>18</sup>**

Kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Dan tujuan yang lainnya juga seperti menstabilkan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan harga. dan pemerintah juga berusaha mengoptimalkan peran tersebut melalui Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Dengan demikian belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PDB Indonesia, jika Pemerintah Indonesia meningkatkan belanja pemerintah akan meningkatkan PDB Indonesia. Dimana belanja pemerintah berhubungan positif terhadap PDB.

### **2.6.3. Hubungan Tenaga Kerja dengan PDB**

Tenaga Kerja akan mempengaruhi PDB di suatu negara dikarenakan tenaga kerja akan mempengaruhi aktifitas bisnis dan perekonomian di Indonesia, yang dimana ketika pertumbuhan ekonomi semakin membaik maka tenaga kerja akan meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga dimana daya produksi barang dan jasa akan meningkat secara signifikan yang dimana bisa dikatakan bisnis dan perekonomian akan maju.

Menurut Todaro dalam penelitian Phany Ineke Putri menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup>Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2016, hal. 168

**“Pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki skill yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.”<sup>19</sup>**

Selanjutnya hubungan Tenaga kerja dijelaskan oleh Todaro yang berpendapat bahwa :

**“Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya ”.<sup>20</sup>**

Dengan demikian semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di suatu negara akan meningkatkan PDB negara tersebut, hubungan tenaga kerja terhadap PDB adalah positif .

#### **2.6.4. Hubungan Inflasi dengan PDB**

Inflasi akan mempengaruhi PDB di suatu negara dikarenakan inflasi akan mempengaruhi aktivitas perekonomian yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi di masa depan, menyebabkan investasi yang akan berkurang dan akan membuat permasalahan perekonomian yang lainnya.maka pemerintah berusaha untuk mengurangi dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perekonomian yang bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi untuk perkembangan pertumbuhan perekonomian indonesia.

Berdasarkan teori Keynes sebagaimana dikutip Ismail Fahmi Lubis menyatakan bahwa :

---

<sup>19</sup>Phny Ineke Putri, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pulau jawa, **Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kebijakan**,<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3892/3534,2004>, (diakses tanggal 14 Januari 2020) , Hal 111.

<sup>20</sup>Michael P.Todaro, dan Stephen C. Smith, **Op.Cit**, Hal 93.

**“Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini adalah di dalam jangka pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat (AS) adalah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan output juga naik. Selanjutnya hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhannya ekonomi dengan dimana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun.”<sup>21</sup>**

Keadaan ini membenarkan bahwa secara empiris dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi dapat membuat pertumbuhan ekonomi turun.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Pada pembagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Karolina Aritonang Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2000-2018. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder di Indonesia yaitu :utang luar negeri, pengeluaran pemerintah, defisit anggaran dan produk domestik bruto. Pengumpulan data dimulai dari tahun 2000 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

**“(1) Utang Luar Negeri Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2000-2018, (2) Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2000-2018, (3) Utang Luar Negeri dan Pengeluaran**

---

<sup>21</sup>Ismail Fahmi Lubis, Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia: **QE Journal**, Vol.03 No 1, hal 4, 2004.

**Pemerintah secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Produk Domestik Bruto Tahun 2000-2018.”<sup>22</sup>**

2. Penelitian Herman Ardiansyah Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiadalam penelitiannya tersebut menjelaskan Inflasi berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi asosiatif . Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di indonesia. Pengumpulan data dimulai dari tahun 1970 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : “Variabel inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”<sup>23</sup>

3. Penelitian Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, Sabri. Abd. Majid Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di indonesia. Menjelaskan Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode fungsi pertumbuhan dari beberapa teori yaitu teori Harrod-Domar dan Solow dengan variabel yang mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu :investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

**“ (1) Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (2) Investasi secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (3) Tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (4)**

---

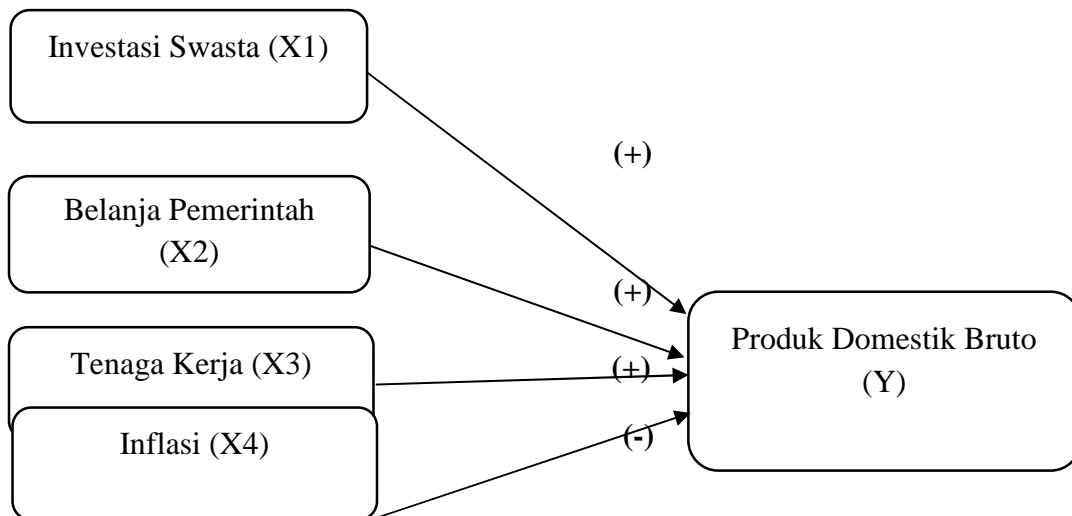
<sup>22</sup>Karolina Aritonang, **Op.Cit**, Hal 67.

<sup>23</sup>Herman Ardiansyah, **Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia** ,<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/20601>, 2017 ,(Diakses tanggal 14 januari 2020), hal 5.

**Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>24</sup>**

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis merupakan suatu diagram yang secara garis besar menjelaskan secara logika dalam sebuah penelitian, yang berdasarkan pertanyaan penelitian, dan mempresentasikan suatu konsep pada hubungan.



Gambar 2.8: Kerangka Pemikiran

## 2.9. Hipotesis

---

<sup>24</sup>Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, dan Sabri. Abd. Majid, Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: **Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik** Vol 3 Nomor 2, November, 2016, Hal 114.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru disarankan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
4. Inflasi berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen yaitu investasi swasta, belanja pemerintah, tenaga kerja, inflasi terhadap variabel dependen yaitu PDB Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* untuk periode 2003-2018.

#### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Investasi Swasta di Indonesia periode 2003-2018
2. Data Belanja Pemerintah di Indonesia periode 2003-2018
3. Data Inflasi di Indonesia periode 2003-2018
4. Data Tenaga Kerja di Indonesia periode 2003-2018
5. Data Produk Domestik Bruto di Indonesia 2003-2018

#### **3.3 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### **3.4 Model Analisis**

### 3.4.1. Model Ekometrika

Model yang digunakan untuk menganalisis Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2003-2018 menggunakan model ekonometrik. Penggunaan ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur batasan kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural bertujuan memahami ukuran kuantitatif, pengujian dan validasi hubungan variabel-variabel ekonomi. Model ekonometrik yang digunakan adalah model regresi linear berganda.

### 3.4.2 Pendugaan Model Ekometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaan regresi sampel adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{S}_0 + \hat{S}_1 X_1 + \hat{S}_2 X_2 + \hat{S}_3 X_3 + \hat{S}_4 X_4 + \epsilon_i; i = 1, 2, 3, 4, \dots, n,$$

dimana:

$Y$  = Produk Domestik Bruto (Rp)

$\hat{S}_0$  = Intersep

$\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3, \hat{S}_4$  = Koefisien regresi (Statistik)

$X_1$  = Investasi Swasta (Rp)

$X_2$  = Belanja Pemerintah (Rp)

$X_3$  = Tenaga Kerja (Orang)



$X_4$  = Inflasi (%)

$i$  = Galat (*Error term*)

### 3.4.3. Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Inflasi) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (PDB), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata = 5%.

#### a) Investasi Swasta ( $X_1$ )

$H_0: S_1 = 0$  artinya, Investasi Swasta tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia

$H_1 : S_1 > 0$  artinya, Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :  $t_h = \frac{\hat{S}_1 - S_1}{S(\hat{S}_1)}$

$\hat{S}_1$  : koefisien regresi (Statistik)

$S_1$  : parameter

$S(\hat{S}_1)$  : simpangan baku koefisien regresi sampel

Data pengambilan keputusan apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Investasi Swasta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB

Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Investasi Swasta secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

**b) Belanja Pemerintah ( $X_2$ )**

$H_0 : S_2 = 0$  artinya, belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia.

$H_1 : S_2 > 0$  artinya, belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah : 
$$t_h = \frac{\hat{S}_2 - S_2}{S(\hat{S}_2)}$$

$\hat{S}_2$  : koefisien regresi (Statistik)

$S_2$  : parameter

$S(\hat{S}_2)$  : simpangan baku koefisien regresi

Data pengambilan keputusan apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya belanja pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Belanja Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

**c. Tenaga Kerja ( $X_3$ )**

$H_0 : S_3 = 0$  artinya, tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia.

$H_1 : S_3 > 0$  artinya, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{S}_3 - S_3}{S(\hat{S}_3)}$$

$\hat{S}_3$  : koefisien regresi (Statistik)

$S_3$  : parameter

$S(\hat{S}_3)$  : simpangan baku koefisien regresi

Data pengambilan keputusan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

#### d. Inflasi ( $X_4$ )

$H_0 : \beta_4 = 0$  artinya, inflasi tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia.

$H_1 : \beta_4 < 0$  artinya, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

PDB Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{S}_4 - S_4}{S(\hat{S}_4)}$$

$\hat{\beta}_4$  : koefisien regresi (Statistik)

$\beta_4$  : parameter

$S(\hat{\beta}_4)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

#### 3.4.4. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang di jelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0$  :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  berarti variabel bebas secara serentak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1$  :  $\beta_i$  tidak semua nol,  $i = 1, 2, 3, 4$ , berarti variabel bebas secara serentak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denomerator (n-k).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

data berpengaruh regresi Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas (signifikan)  $< 0,05$  atau  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan)  $> 0,05$  atau  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.

### 3.4.5. Uji Kebaikan Suai ( $R^2$ )

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$  ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu

menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik”<sup>25</sup>

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuarat Total

### 3.4.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.4.6.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.

---

<sup>25</sup>Agus Widarjono, **Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal 26.

- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai  $VIF < 10$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya  $VIF > 10$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi parsial. Cara ini di peroleh di bandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  lebih besar dari pada nilai  $R^2$  pada model utama terdapat multikolinearitas

#### **3.4.6.2 Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu

##### **a) Uji Durbin-Watson**

Dilakukan dengan membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien. Uji Durbin-Watson dirumuskan dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan dU dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai . Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D - W di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D - W di antara - 2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D - W di atas + 2 berarti ada autokorelasi negatif

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan Uji Run.

#### **b) Uji Run**

Merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Cara yang digunakan dalam Uji Run adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak

Dan pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu :

- Jika Asymp. Sig.(2-tailed) < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
- Sebaliknya jika Asymp. Sig.(2-tailed) > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi



### **3.4.6.3 Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

#### **1) Analisis Grafik**

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

#### **2) Uji Nilai Kemencengan Skewness dan Keruncingan Kurtosis**

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau titik hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat :

- Nilai kemencengan atau penjuluran (skewness)

- Keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat.

Menurut Ghozali: “nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \quad \text{dan} \quad Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel. Jika}$$

nilai  $Z_{skewness}$  dan  $Z_{kurtosis}$  berada dalam  $-1,96 \leq Z \leq 1,96$  untuk  $\alpha = 0,05$  berarti sebaran galat adalah normal.

### 3) Uji One- Sample- Kolmogrof-Smirnov

Untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S)<sup>26</sup>.

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut”

$H_0$ : Data galat (residu) menyebar normal

$H_1$ : Data galat tidak menyebar norma

1

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

---

<sup>26</sup>H. Iman Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate ddengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal. 108.

**1. Produk Domestik Bruto (Y)**

Produk domestik bruto sebagai ukuran dari pendapatan riil yang diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dalam satu tahun tertentu. Data yang diperoleh dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

**2. Investasi Swasta (X1)**

Investasi Swasta adalah Total Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana investasi adalah aktivitas yang menempatkan suatu dana pada satu periode yang mempunyai tujuan yaitu keuntungan dan nilai investasi. Investasi dinyatakan dalam Satuan Rupiah (Rp)

**3. Belanja Pemerintah (X2)**

Belanja Pemerintah adalah suatu kewajiban yang berasal dari pemerintah pusat yang diakui secara nasional yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Belanja Pemerintah berasal dari pengurangan nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah. Belanja pemerintah terbagi atas APBN dan APBD. Belanja Pemerintah dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).

**4. Tenaga Kerja (X3)**

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, biasanya yang tergolong usia kerja adalah 15-64 tahun (Orang).

**5. Inflasi (X4)**

Inflasi adalah proses kenaikan harga yang meningkat secara terus-menerus yang berkaitan dengan perekonomian yang diakibatkan beberapa faktor-faktor seperti konsumsi

masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi dihitung dalam Satuan Persen (%).